

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Buleleng

KOMANG REDIASTITI*

STIE Satya Dharma Singaraja
Jl. Yudistira No.11, Kendran, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81112
E-mail : Komangrediasiti8687@gmail.com

Submit: 27 Juni 2022

Review: 10 Juli 2022

Publish: 30 Juli 2022

*) Korespondensi

Abstract: *This study aims to examine how much influence the variables of the village financial information system, apparatus competence and internal control on the accountability of village funds in Buleleng Regency. The design used in this study is a quantitative type. The sample in this study is the village treasurer in Buleleng Regency. As for this sample, it is related to the village treasurer in Buleleng Regency, then in this study the number of samples was 129. Data collection was carried out through the dissemination of questionnaires using multiple liner regression analysis using the SPSS statistical application. The results obtained in this study are: (1) the rural financial information system has a positive and significant effect on the accountability of village funds in Buleleng Regency (2) the competence of the apparatus affects the accountability of village funds in Buleleng Regency, (3) locations have a positive and significant effect on the accountability of village funds in Buleleng Regency.*

Keywords: *Financial Information System, Apparatus Competence And Internal Control*

Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara fungsinya desa masuk dalam tata pemerintahan paling bawah yang menjadi tonggak pembangunan di Indonesia. Desa diberikan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh (Sumpeno,2011), melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dari pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya. Oleh karena itu, dana desa yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan baik maka pemerintah desa dituntut untuk melakukan transparansi atas alokasi dana tersebut.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017), akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Rondinelli (2017), menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat

kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, Sesuai dengan pengertian asas desentralisasi, pemerintahan desa sebagai pemerintah tingkat terendah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Berbagai masalah dalam otonomi daerah sekurang-kurangnya masih ada 4 (empat), dan tiga yang masih saling berkaitan, yaitu: (1) melebarnya tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan, dan kemampuan keuangan antar daerah; (2) masih minimnya kemampuan daerah dalam mengelola diri sendiri; (3) politisasi isu (otonomi daerah), terutama dalam kasus pemekaran wilayah yang cenderung berlebihan dan hanya memboroskan uang negara; (4) merebaknya korupsi di daerah yang memunculkan fenomena desentralisasi korupsi. Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakanseseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Perkembangan sektor publik di Indonesia semakin menguatkan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, unitunit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di instansi pemerintahan, harus memegang teguh tiga prinsip yaitu pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; kedua, berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketiga,

menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi instansi yang kurang baik yaitu yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel ini akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen dalam melayani publik (Riantiano dan Azlina, 2011). Sangat penting bagi pemerintah daerah khususnya aparaturn pemerintah desa agar memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Karena alasan peneliti menetapkan melaksanakan penelitian pada di Kabupaten Buleleng adalah karena keterbatasan peneliti dalam menjangkau lokasi diluar Kabupaten Buleleng, sehingga penelitian hanya difokuskan pada desa yang dapat dijangkau peneliti dan di desa tersebut terdapat fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa. Pelaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban keuangan terdapat banyak desa yang masih belum lengkap dalam hal keuangan sehingga diperlukan pembinaan dalam rangka menuju tertib peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harafonna dan Indriani (2019) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Deva (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa sistem informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas dana desa. Muhani (2019), dalam penelitiannya memperoleh bahwa kompetensi aparaturn berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Karyadi (2019) memperoleh hasil penelitian bahwa sistem

pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan tabel 01 dapat dilihat bahwa masih adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Buleleng. Dengan kata dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Dalam kasus penerimaan dana desa yang cukup besar ini masih memiliki permasalahan terkait akuntabilitas dana desa. Dalam penelitian ini adanya minimalitas sistem informasi keuangan yang diberikan desa kepada masyarakat, terkait nominal dana, alokasi dana dan bukti realisasi dana melalui program desa. Kemudian terkait kompetensi aparatur desa. Hal ini melibatkan sumber daya manusia yang ada di internal pemerintahan desa etos kerja perangkat desa tergolong rendah sehingga dalam menyertakan bukti pendukung seperti daftar hadir, tanda terima dan lain-lain masih kurang lengkap. Kurangnya kompetensi yang dimiliki menyebabkan hasil dari pengelolaan dana desa kurang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu dalam realisasi kerja melalui program terkadang sering terjadi keterlambatan pencairan dana desa yang mengakibatkan pembangunan yang direncanakan berjalan tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya, sehingga dalam penyerahan laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada pemerintah pusat juga mengalami keterlambatan. Selanjutnya, terkait pengendalian internal adalah bagaimana kontrol intern sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dalam hal melakukan akuntabilitas dana desa.

Dalam hal ini sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa

tingkat pengendalian intern pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng masih kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut permasalahan mengacu pada akuntabilitas dana desa terkait sistem informasi keuangan, kompetensi aparatur dan pengendalian internal. Hal ini merupakan bukti bahwa akuntabilitas di desa masih kurang baik. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Menurut Murdani (2007), sistem informasi adalah suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Menurut Rosmery Elsy (2016) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola. Pemerintah desa diharuskan untuk melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) desa serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Desa merupakan bagian dari susunan pemerintahan Indonesia di skala desa, yang tidak terlepas dari pengawasan yang mengharuskan adanya transparansi terkait

jalannya keuangan desa (Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari penting yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan merupakan hal penting dalam tata kelola keuangan.

Sistem infoarmasi keuangan merupakan layanan informasi terkait masalah-masalah keuangan, yang dapat dijadikan alternatif pemerintah desa untuk melaporkan jalannya keuangan desa secara terbuka, yang kemudian akan di nilai langsung oleh masyarakat terkait baik tidaknya kinerja yang dimiliki pemerintah. Kompetensi adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang berpengaruh langsung terhadap baik tidaknya hasil kerja seseorang. Kompetensi adalah pondasi utama yang ahrus dimiliki oleh seseorang yang menjadi tolak ukur seberapa efektif kinerja seseorang (Spencer, 2018). Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan yang ada pada diri sesorang baik itu kecakapan, ketrampilan dan kemampuan. Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar membantu individu dalam mengasah kemampuan yang dimiliki. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus. Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individuselama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan.

Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu muncul dan berkembang melalui proses belajar dan melibatkan tiga domain yaitu: domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur adalah kemampuan yang ada pada diri sesorang baik itu kecakapan, ketrampilan dan kemampuan, yang mana hal ini merupakan pondasi utama yang

harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi tolak ukur seberapa efektif kinerja yang dimiliki. Pengendalian internal atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Sedangkan menurut Hery (2016), pengendalian internal adalah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Desy, dkk 2017).

Pengendalian internal telah menjadi bagian penting yang perlu diawasi oleh seorang auditor dalam hal ini auditor inspektorat daerah. Sistem Pengendalian Internal memegang peran penting dalam organisasi. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, maka kegiatan operasional juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses operasional operasional koperasi juga dapat diminimalisir (Lestari, dkk 2018). Sistem pengendalian internal dalam pemerintah merupakan faktor penting, karena adanya sistem kontrol yang dapat mempengaruhi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan internal dan dapat memiliki implikasi untuk akuntsbilitas dan transparansi pemerintah desa (Triyono, dkk, 2019). Pengendalian internal telah menjadi bagian penting yang perlu diawasi oleh seorang auditor dalam hal ini auditor inspektorat daerah. Sehingga dalam pengawalan pengalokasian dana desa pun sangat membutuhkan adanya pengawasan penyalurannya dan diharapkan seluruh pihak baik dari tingkat kabupaten hingga desa sebagai pelaksanaan dana desa dapat dengan

mudah terorganisir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Sehingga dalam pengawalan pengalokasian dana desa pun sangat membutuhkan adanya pengawasan penyalurannya dan diharapkan pelaksanaan dana desa dapat dengan mudah terorganisir.

Menurut Poae dan Saerang (2013:29) akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya. Menurut Poae dan Saerang (2013), transparan merupakan suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Menurut Setiana dan Yuliani (2017), akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Menurut Setiana dan Yuliani (2017), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka Waladiyah (2018).

Menurut Wisnawati,dkk (2018), pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip prinsip pelaksanaan yang

transparan dan terbuka, peran aktif masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi per lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan dana desa dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Menurut program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018), menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu: 1. Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya, 2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya, 3. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan, 4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada. 5. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dana desa merupakan pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah desa kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka, yang mana harus berdasarkan pada prinsip prinsip pelaksanaan yang transparan dan terbuka.

METODE

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Buleleng dikarenakan terkait akuntabilitas dana desa bahwa masih adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Buleleng. Dalam kasus penerimaan dana desa yang cukup besar ini

masih memiliki permasalahan terkait akuntabilitas dana desa. Adapun jenis dan sumber data yaitu : 1. Data Kualitatif, 2. Data kuantitatif, *purposive sampling* dapat diartikan sebagai pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah bendahara desa di Kabupaten Buleleng.

HASIL

Dalam sebuah penelitian, hasil dan pembahasan merupakan hal yang penting untuk di deskripsikan dengan sejelas jelasnya. Dalam penelitian ini adapun deskripsi hasil penelitian sebagai rangkaian penjabaran hasil penelitian setelah dilakukannya analisis terhadap data. Deskripsi teknik penulisan yang dibuat guna menyusun serta menampilkan ringkasan yang ada sehingga nantinya mampu memudahkan pembaca dalam memahami sekaligus mengerti substansi dan makna dari laporan penelitian yang dibuat. Penyebaran kuesioner dirangkum guna menunjukkan bagaimana hasil penyebaran untuk memastikan hasil penyebaran yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu : 1. Baik dan Lengkap, 2. Tidak Lengkap Jawaban, 3. Tidak Balik. Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat seperti apa hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 129 responden. Dalam penelitian ini kuisisioner yang layak digunakan adalah sebanyak 129 kuesioner atau sama dengan seluruhnya dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan bantuan aplikasi statistika SPSS versi 20 for windows. Salah satu kegiatan penelitian adalah pengumpulan data.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dan menggunakan alat tertentu yang sering disebut instrumen penelitian. Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, ditata, dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara fenomena. Adapun uji instrument data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas : 1. Uji validitas, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana

alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur.

Uji validitas merupakan kegiatan analisis data setiap variabel untuk menjawab rumusan masalah, serta menguji hipotesis yang telah diajukan. Tetapi apabila nilai $< 0,3$ maka data dikatakan tidak memenuhi syarat uji validitas. Berdasarkan ketentuannya apabila sebuah data memenuhi ketentuan $> 0,3$ maka dapat dikatakan valid. tetapi apabila nilai $< 0,3$ maka data dikatakan tidak memenuhi syarat uji validitas. Sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tabel 5.2, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian adalah valid. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai dari masing-masing item pernyataan yang seluruhnya $> 0,3$, dengan kata lain sebuah data memiliki koefisien korelasi positif. 2. Reliabilitas, uji reliabilitas adalah merupakan cara untuk melakukan pengukuran terhadap konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Dalam sebuah penelitian uji realibilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Melalui uji instrument data pada tabel 5.4 dengan jumlah responden sebanyak 129 orang yang dilakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan koefisien alfa. Dari hasil perhitungan reliabilitas pengujian terhadap variabel, apabila dilakukan perbandingan dengan kriteria alpha reliabilitasnya maka semua variabel yang diteliti dalam memiliki nilai yaitu diatas 0,60 sebagai syarat reliabel. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan reliabel. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik.

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heterokedastisitas. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Tidak ada ketentuan khusus tentang urutan tes yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Misalnya, analisis semua tes penerimaan klasik dilakukan, dan yang kemudian tidak memenuhi persyaratan. Setelah itu tes akan ditingkatkan dan tes lebih lanjut akan dilakukan setelah memenuhi persyaratan. 3. Uji Normalitas, uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Seringkali kesalahan terjadi yaitu bahwa tes normalitas dilakukan untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas dalam nilai residual bukan dalam variabel penelitian.

Demikian juga nilai rata-rata, mode dan median relatif berdekatan. Tes normalitas dapat dilakukan dengan tes histogram, tes normal atau tes *Kolmogorov-Smirnov*. Oleh karena itu, penggunaan uji normalitas dengan uji statistik tidak diragukan meskipun tidak dapat dijamin bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode diagram. Sesuai dengan hasil pengujian uji asumsi klasik terkait uji normalitas dapat diketahui melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan berfokus pada nilai *Asymp Sig. (2-Tailed)* memiliki nilai sebesar 0,535. Nilai tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari kuesioner yang telah disebar dapat dikatakan tidak terjadi masalah normalitas dikarenakan berdistribusi secara normal. 4. Uji Multikolinieritas, uji multikolinieritas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu.

Ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dideteksi bila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan toleransi $> 0,1$ berarti tidak ada masalah multikolinieritas. Adapun ketentuan dalam uji multikolinieritas adalah sebuah data dikatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas apabila nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* 0,1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini menghasilkan nilai VIF tidak lebih dari 10.

Diketahui bahwa nilai VIF pada sistem informasi keuangan desa sebesar 8.835, kompetensi aparatur sebesar 8.488 dan pengendalian internal sebesar 3.201. Sesuai dengan ketentuan yang ada nilai VIF dari ketiga variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari pada 10, maka dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas. 5. Uji Heteroskedastisitas, dalam uji heteroskedastisitas, diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan lainnya yang disebut *homoscedasticity*. Beberapa solusi alternatif, jika model tersebut melanggar asumsi heteroskedastisitas adalah mengubahnya menjadi bentuk logaritmik. Ini hanya mungkin jika semua data positif. Atau semua variabel dapat dibagi dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model regresi, dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda akan

disebut heteroskedastisitas.

Kurva residual dimana data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga uji normalitas terpenuhi. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dapat digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dirubah-rubah. Tabel diatas merupakan hasil analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat dijabarkan penjelasan regresi dalam bentuk bentuk *standardized* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,725 + 0,297 + 0,384 + 0,195$$

Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel sistem informasi keuangan desa adalah 0,297. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel sistem informasi keuangan desa maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,297 + 0,725 = 1,022$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik sistem informasi keuangan desa maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi keuangan desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Dikatakan demikian, karena adapun hubungan sistem informasi keuangan desa dengan akuntabilitas dana desa adalah apabila sistem informasi keuangan desa dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat, sehingga arus alokasi dana yang ada dapat diawasi secara bersama sama antara pemerintah dan masyarakat desa.

Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel kompetensi aparatur adalah 0,384. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel kompetensi aparatur maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725.

Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,384 + 0,725 = 1,022$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik kompetensi aparatur maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Dikatakan demikian, karena adapun hubungan kompetensi aparatur dengan akuntabilitas dana desa adalah apabila kinerja dalam internal pemerintahan desa terealisasi dengan sebaik baiknya, ini akan berimbas pada baik tidaknya akuntabilitas dana desa, yang mana segala sesuatu terkait akuntabilitas desa apabila tidak didukung dengan kinerja aparatur yang baik, maka mustahil akuntabilitas dana desa dapat terealisasi dengan baik. Sehingga kinerja yang baik akan berdampak baik bagi tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel pengendalian internal adalah 0,195. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel pengendalian internal maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,195 + 0,725 = 1,022$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik variabel pengendalian internal akan semakin baik akuntabilitas dana desa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap akuntabilitas dana desa. Dikatakan demikian, karena adapun hubungan variabel pengendalian internal dengan akuntabilitas dana desa adalah terkait aktifitas dengan stabilitas dalam internal yang terorganisir dengan baik dan terkendali sehingga akan berdampak terhadap akuntabilitas dana desa. Sehingga pengendalian internal yang dapat direalisasikan dengan baik maka akan berdampak baik bagi tujuan yang diharapkan. Uji R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dari hasil uji, diperoleh nilai adjusted R sebesar 0,878 atau 87,8%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa dapat dijelaskan sebesar 87,8% oleh variabel bebas dan sisanya sebesar 12,2% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Menurut Sugiyono (2018;223) Uji t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti.

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan Uji F sesuai dengan ketentuan yang ada apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tetapi apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat diartikan variabel bebas dalam penelitian secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Simultan (Uji F), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Menurut Sugiyono (2017), uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan Apabila nilai

probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka dapat dijelaskan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tetapi sebaliknya jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka didapat F-hitung ini menandakan bahwa variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap peningkatan penjualan dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,050$. Pembahasan penelitian adalah jawaban pertanyaan penelitian.

Bagian ini menyajikan tiga hal, yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan pembahasan penelitian. Dalam penelitian adanya pembahasan adalah penjabaran hasil analisis atas uji yang telah dilakukan dalam sebuah penelitian terkait pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel sistem informasi keuangan desa adalah 0,297. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel sistem informasi keuangan desa maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,297 + 0,725 = 1,022$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik sistem informasi keuangan desa maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. Dewi (2019) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. 2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel kompetensi aparatur adalah 0,384. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel kompetensi aparatur maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,384 + 0,725 = 1,109$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik kompetensi aparatur maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. 3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa, sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel pengendalian internal adalah 0,195. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel pengendalian internal maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,195 + 0,725 = 0,92$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik variabel pengendalian internal akan semakin baik akuntabilitas dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Karyadi (2019) memperoleh hasil penelitian bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Suamdi (2020, berdasarkan hasil penelitian memperoleh bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas dana desa. Dalam hal ini pengendalian internal berkaitan dengan jalannya kinerja terkait sumber daya manusia. Suharti, Sri (2019) menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

SIMPULAN

Kesimpulan merupakan rangkuman yang mencerminkan hasil akhir dari sebuah penelitian. Sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Sesuai

dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel sistem informasi keuangan desa adalah 0,297. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel sistem informasi keuangan desa maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,297 + 0,725 = 1,022$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik sistem informasi keuangan desa maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. 2). Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel kompetensi aparatur adalah 0,384. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel kompetensi aparatur maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,384 + 0,725 = 1,109$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik kompetensi aparatur maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. 3). Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel analisis regresi, adapun nilai koefisien variabel pengendalian internal adalah 0,195. Berdasarkan nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel pengendalian internal maka akuntabilitas dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana desa adalah $0,195 + 0,725 = 0,92$. Sehingga dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin baik variabel pengendalian internal akan semakin baik akuntabilitas dana desa. Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka dapat dipaparkan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait akuntabilitas dana desa di

Kabupaten Buleleng guna perbaikan terkait sistem informasi keuangan desa, kompetensi aparatur dan pengendalian internal, 2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian terkait variabel sistem informasi keuangan desa, kompetensi aparatur dan pengendalian internal dengan memperluas objek, subjek serta melakukan penelitian lebih mendalam dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). In UM Magelang Conference Series (pp. 266-284).
- Atiningsih, Suci .(2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur pengelolaan dana desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengeendalian Internal Terhadap Akzuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan.
- Chema G, Shabir, and Rondinely, Dennis, ed. 2017. Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries. London.
- Desy, L. S. D., Purnamawati, I. G. A., dan Trisna N. H,. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen, Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akruwal (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Bangli). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha. Vol. 7 No. 1.
- Deva, Julianto. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Dewi, 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Profesi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Harafonna, Cut Nadhifa dan Indriani, Mirna.2019. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Hery .2016. Akuntansi Dasar 1 dan 2. Cetakan ketiga. Penerbit PT Gramedia, Jakarta Darmawi.
- Husein, Umar. 2014. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kristianingrum, Susila. 2018. Manajemen Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kurnia, Septiawan. Santana. 2017. Jurnalisme Kontemporer, Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2018. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No.1.

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Mathis & Jackson, John. 2017, Human Resource Management (edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Muhani. 2019. Pengaruh Kompensasi Aparatur Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nugroho dan Ratih Paramita. 2018. Analisis Pengaruh Lokasi, Keanekaragaman Barang Terhadap Keputusan Berbelanja dan Loyalitas Konsumen di Carrefour Semarang. EKOBIS vol. 2 no. 1. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Nurchahyo. 2020. Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
- Poae & Saerang. 2017. Manajemen Keuangan. Jurnal Jurnal Akuntansi & Manajemen.
- Pramularso, E. Y., & Spencer, M. (2018). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta, II(1).
- Ruru, Lestari., Kalangi, Lintje., dan Budiarmo, Novi S.. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi. Vol 12, No 01.
- Sagala, Syaiful. 2017. Human Capital: Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas. Depok: Kencana.
- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Suamdi, 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sekecamatan Petang. Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Reinforcement A
- Triyono., Achyani, Fatchan., dan Arfiansyah, Mufti Arief. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Waladiyah, Ulfah. 2018. "Pengaruh Kepatuhan Atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI)". Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Wibowo 2016. Manajemen Kinerja, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Yul. 2020. Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Peran Teknologi Informasi. Fakultas ekonomi Dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.